



► INFRASTRUKTUR KEBUDAYAAN

Proyek Taman Budaya Terhambat Anggaran

SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyampaikan pembangunan Taman Budaya Sleman tidak dapat dilakukan secara cepat lantaran ada pemotongan anggaran. Pemotongan ini terjadi akibat Dana Keistimewaan DIY juga berkurang.

Tim Kerja Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman, Rahmadi, mengatakan jajarannya mengusulkan anggaran Rp10 miliar guna melanjutkan pembangunan Taman Budaya Sleman di Kalurahan Pandowoharjo, Sleman. Namun, DPUPKP Sleman hanya mendapat Rp5,7 miliar. "Paniradya Kaistimewaan melakukan rasionalisasi anggaran. Akhirnya, pengajuan kami disetujui dengan nominal yang berbeda," kata Rahmadi saat dihubungi, belum lama ini.

Adapun saat ini hanya ada talut dan drainase serta fondasi kecil. Belum ada pembangunan gedung. Pengerjaan drainase dan talut akan dilakukan pada 2025. Selain itu, ada pembangunan fondasi pembatas dengan lahan warga sekitar.

Tanah milik Pemkab Sleman tersebut perlu mendapat batas yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan warga. Total kebutuhan anggaran pembangunan mengacu pada *Detail Engineering Design (DED)* Taman Budaya tersebut sekitar Rp120 miliar.

"Ada usulan pengamanan lahan Taman Budaya. Kami usul di redesign satu. Re-design paling sekitar Juni. Kami harus menghitung kembali kebutuhannya berapa menyesuaikan waktu yang tersedia. Kalau redesign Juni, ada waktu hingga November - Desember 2025 pekerjaannya," katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Sleman, Edy Winarya, mengatakan keberadaan taman budaya penting untuk menumbuhkembangkan ekosistem kebudayaan melalui ekspresi kreativitas, pameran, hingga pengembangan festival budaya.

Ruang yang dihadirkan seperti ruang pameran, pentas, eksplorasi, panggung terbuka, dan sebagainya menjadi wujud kehadiran Pemerintah dalam memfasilitasi seniman dan budayawan untuk beraktivitas atau berekspresi.

Menurutnya, Gubernur DIY memiliki program strategis untuk mendirikan taman budaya di kabupaten/ kota di DIY. Kebijakan strategis ini merupakan upaya pengembangan kebudayaan. Dengan begitu predikat keistimewaan menjadi lebih kokoh.

Edy menjelaskan pengembangan kebudayaan perlu memerhatikan sumber daya manusia dan kelembagaan budaya. Katanya, ada banyak lembaga budaya, tapi kontribusi terhadap pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan masih kurang. (Andreas Yuda Pramono)